



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 2
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024
Waktu : Pukul 11.42--13.14 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : 1. Membahas Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024;
2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2023.
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si.
(F-PDI Perjuangan/Ketua Komisi V DPR RI)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.,
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)
- Hadir : A. Pimpinan
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Ir. Ridwan Bae
3. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
4. Roberth Rouw
B. Anggota
5. Mochamad Herviano
6. Sri Rahayu
7. Harvey B. Malaihollo
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS

h

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

9. Drs. Hamka B Kady, M.S.
10. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

11. Sudewo, S.T., M.T.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

12. Drs. H. Tamanuri, M.M.
13. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
14. Drs. H. Soehartono, M.Si.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

15. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
16. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
17. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
18. H. An'im Falachudin Mahrus
19. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

20. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
21. Willem Wandik, S.Sos.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

22. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
23. Ir. H. Sigit Sosiantomo
24. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
25. KH. Toriq Hidayat, Lc.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

26. H. Boyman Harun, S.H.
27. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
28. H. A. Bakri HM, S.E.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

29. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

- Izin :
1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. (F-PDI Perjuangan).
 2. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan).
 3. Cen Sui Lan (F-PG)
 4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. (F-PG)
 5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T. (F-Gerindra)

6. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (F-Gerindra)

Undangan

- :
1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.).
 2. Pejabat Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI beserta jajarannya.

h

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Bapak-Ibu sekalian,
Kita mulai sudah telat 15 menit kita.
Mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Segenap Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajarannya,
Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan rapat siang hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan dengan agenda juga sudah kami kirim terkait dengan materi rapat kita pada hari ini.

Menurut informasi dari Sekretariat, sudah hadir 17 Anggota menandatangani absen dan dari unsur 7 unsur fraksi yang berbeda.

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan Tata Tertib, rapat ini sudah bisa kita mulai dan bisa mengambil keputusan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.42 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta seluruh jajaran sudah menghadiri undangan kami pada hari ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Saudara Menteri dan seluruh jajaran,
Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Banggar DPR RI tanggal 10 Juni 2024 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2023 dan Rencana Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2025, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan mitra Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam rangka membahas evaluasi

APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP APBN tahun 2023 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, itulah agenda kita pada hari ini.

Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa realisasi anggaran Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada 19 Agustus 2024 adalah sebesar 52,05%. Untuk itu pada kesempatan Rapat Kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan dari Menteri Desa PDT dan Transmigrasi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2023, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami ucapkan selamat kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang untuk kesekian kalinya sudah mendapatkan predikat WTP.

Namun demikian, masih terdapat beberapa temuan di antaranya terdapat realisasi capaian *output* meskipun tidak ada realisasi anggaran belanja, terdapat ketidaktertiban pengaturan PNBPN lainnya ke kas negara, dan pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

Oleh karena itu, pada Raker hari ini kami Komisi V DPR RI hendak mendengarkan laporan dari Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, langkah apa saja yang sudah diambil terkait dengan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu evaluasi APBN tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP APBN tahun 2023.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga sebagai penegasan dalam rapat kali ini adalah yang pertama pengawasan dan evaluasi rutin internal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk memastikan bahwa program-program Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berjalan sesuai dengan rencana baik terkait pencapaian progres, identifikasi masalah, dan penentuan langkah-langkah perbaikan. Terkait poin satu ini, Pak Menteri, mungkin PR berat kita adalah bagaimana kita melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penggunaan dana desa, Pak Menteri. Ini dana desa yang sumbernya APBN itu 90%, yang 10%-nya adalah penyertaan dari APBD kabupaten setempat. Sampai hari ini kami menemukan ada banyak sekali masalah di penggunaan dana desa itu, mungkin ini bahan evaluasi kita selama 5 tahun, Pak, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa ke depan.

Pada hari ini, Pak Menteri juga pasti tahu, ada banyak kepala desa yang tersangkut masalah terkait dengan terjadi pelanggaran dalam penggunaan dana desa ini. Ini PR besar kita, Pak, selama 5 tahun, memang anggaran dana desa yang begitu besar, sementara kan pengawasan langsung kita kan ke daerah tuh tipis, Pak, karena Bapak tidak punya instrumen di daerah, akhirnya

mengandalkan pemerintah daerah setempat, ya, bupati melalui instrumennya itu Bawasda dan seterusnya, ya. Ini menurut saya hal yang perlu kita evaluasi dengan sistem demokrasi seperti sekarang, Pak, pemanfaatan dana desa ini sangat rawan sekali untuk diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik di luar kepentingan pembangunan desa itu sendiri.

Jadi, saya rasa ini PR besar kita 5 tahun ini sebagai *review* kita, Pak, ke depan mekanisme pengawasan dana desa ini sebaiknya seperti apa kita lakukan, *gitu loh*. Sekarang kan kita membatasi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi ini tidak punya instrumen, karena kekurangan tenaga juga kalau harus misalnya punya perwakilan di daerah, ini menyangkut personil dan seterusnya. Sementara ketika kita serahkan kepada pemerintah daerah, efektivitas penggunaan dana desa ini harus kita uji, Pak. Ini barangkali, kami semua dari desa, Pak, semua punya desa yang di Dapil sini semua masalahnya sama, Pak ya, dan kami ini cenderung tidak ingin berbenturan dengan kepala desa, Pak, bisa celaka kita kalau Pemilu, Pak ya, tapi ini tidak juga harus kita biarkan, Pak. Yang kasihan adalah ada banyak kita temukan di daerah hari ini kepala desa itu bermasalah setelah menjadi kepala desa, karena ketidaktahuan, ketidaktahuan, atau bahkan mungkin juga ada kesengajaan untuk melakukan penyimpangan penggunaan dana desa itu sendiri.

Nah, instrumen pengawasan ini menurut saya harus kita lakukan supaya dana desa yang begitu besar itu betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa, ya, bukan manfaatnya mungkin hanya bagi perangkat desa saja. Ini yang rasa-rasa harus kita evaluasi ke depan ya, sebagai bahan kita, karena dana desanya akan terus ada, Pak, sepertinya juga pemerintahan yang akan datang juga bahkan menjanjikan dana desa itu mungkin lebih besar dari yang sekarang. *Nah*, ini tantangan menurut saya dalam konteks kita terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Kemudian poin kedua, pengembangan desa wisata atau BUMDes dan BUMDes harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama peningkatan industri kecil menengah, pemanfaatan tenaga kerja produk lokal, dan seterusnya. Ada masih banyak potensi-potensi wisata yang bisa digarap, Pak, dalam menggerakkan perekonomian di desa. Ini juga saya rasa pemerintah dalam hal ini Menteri Desa PDT dan Transmigrasi harus jeli, jeli dalam arti kata melihat mana yang punya potensi, kemudian juga harus cermat, Pak, untuk memilih sehingga jangan sampai setelah kita bangun tidak bermanfaat apa-apa.

Kemudian yang ketiga adalah Komisi V minta kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam penerapan pajak terhadap BUMDes yang dianggap memberatkan bagi BUMDes yang omsetnya masih belum banyak. Ini juga harus kita carikan solusinya ya, jangan sampai nanti lebih berat bebannya daripada penghasilannya.

Kemudian yang keempat, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi agar berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dalam implementasi Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi "Desa yang berada dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi termasuk juga masyarakat yang berada di wilayah taman nasional berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pak Menteri, kemarin kami didatangi 200 lebih kepala desa di sini, Pak, dan saya sendiri yang menerima langsung dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini punya 2 taman nasional, Pak, satu Taman Nasional Betung Kerihun, hutan, yang satunya Taman Nasional Danau Sentarum, Pak. 52% wilayah Kabupaten ini adalah kawasan konservasi tetapi insentif bagi mereka terkait dengan kawasan konservasi ini masih nol sampai hari ini.

Di Undang-Undang Desa, di Undang-Undang Desa yang baru yang Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tadi saya bacakan bunyinya, Pak, bahwa negara harus menyiapkan atau memberi insensip..., insentif kepada kabupaten-kabupaten yang terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk mendapatkan tambahan APBD atau pendapatan asli daerah dari wilayah-wilayah yang tadi saya sebut yang terkena oleh taman nasional, hutan lindung, dan seterusnya. Jadi saya rasa ini juga harus ada berkeadilan karena memang ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Demikian Pak Menteri.

Selanjutnya saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda rapat hari ini.

Saya persilakan.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,

Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda Rapat Kerja yang sudah ditetapkan sebagaimana undangan yang diberikan kepada kami Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Yang pertama, terkait dengan evaluasi APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Sebagaimana kita maklumi Bapak-Ibu sekalian bahwa pagu anggaran 2024 dari pagu awal Rp2.765.969.080.000,00 mengalami penyesuaian *top up* baik itu PHLN maupun penambahan anggaran gaji PP PPPK dan BA-BUN sehingga pagu akhir dari Rp2.765.000.000.000,00 menjadi Rp2.987.429.783.000,00.

Dari total pagu akhir tadi, kemudian kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan *automatic adjustment* sebesar Rp199.180.871.000,00, sehingga pagu efektif setelah *automatic adjustment* pada tahun anggaran 2024 di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Rp2.788.248.912.000,00.

Adapun rincian yang mendapatkan *top up* PHLN sebagaimana di laporan kami dari Dirjen PDP, kemudian Dirjen PEID kemudian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan yang terakhir Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan untuk penambahan anggaran gaji PPPK dari BA-BUN itu hampir semuanya ada penambahan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Dari seluruh pagu anggaran tahun 2024 tersebut sampai dengan 19 Agustus 2024 telah diambil atau terealisasi sebesar 52,05% di mana 52,05% ini ketika disandingkan dengan Rencana Penarikan Dana/RPD 2024 masih di bawahnya, RPD-nya 58,37%, realisasi yang sebenarnya baru 52,05% sehingga masih ada selisih kurang dibandingkan dengan rencana penarikan 6,32%.

Adapun realisasi anggaran untuk 2024 per unit kerja Eselon I, ini tertinggi ada di Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan 62,14%, sedangkan terendah ada di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi 36,27%.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Ketika kita coba sandingkan kinerja serapan anggaran tahun 2023 dengan tahun 2024 sama-sama di bulan Agustus tahun 2024 dan 2023, *alhamdulillah* realisasi 2024 lebih tinggi sedikit dibanding realisasi 2023, artinya ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya di mana 2023 di bulan yang sama, tanggal yang sama 49,42%, hari ini 52,05% ada kenaikan 2,63% dibanding serapan pada bulan Agustus tahun 2023.

Adapun progres pelaksanaan *output* prioritas, yang pertama kegiatan prioritas khususnya bantuan kepada desa dan/atau masyarakat seperti desa wisata, bantuan permodalan BUMDesa, dan infrastruktur ketransmigrasian masih dalam tahap penyelesaian administrasi, sosialisasi, pengecekan lapangan, proses revisi anggaran, dan tahapan pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan terhadap Kebijakan blokir *automatic adjustment*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menyampaikan usulan buka blokir sesuai dengan surat Menteri Nomor: B-871/KEU.00.05/VII/2024, hal: usulan Buka Blokir *Automatic Adjustment* RKAK/L Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun anggaran 2024. Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan atau jawaban dari Menteri Keuangan.

Bapak-Ibu sekalian,

Ini yang agenda yang terkait dengan evaluasi APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Agustus, sehingga masih ada anggaran yang belum ada gambaran buka blokirnya sampai dengan hari ini.

Berikutnya kami akan laporkan juga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN tahun 2023. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Rapat atau Pimpinan Sidang pada pagi hari ini, bahwa *alhamdulillah* untuk Tahun 2023 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan laporan pemeriksaan BPK, kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga kalau kita runut ke belakang sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Kementerian Desa 8 kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tentu ini semua berkat arahan, pengawasan, dan tentu saran dan pertimbangan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Terkait dengan laporan realisasi Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023, ketika kita sandingkan dengan tahun 2022, maka bisa kita lihat bahwa tahun 2023 realisasinya mencapai 98,13% dibandingkan dengan 2022, 96,46%, artinya *alhamdulillah* di tahun 2023 realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan 2022.

Kemudian yang terkait dengan neraca, neraca dalam laporan keuangan menggambarkan posisi aset kewajiban dan ekuitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Aset terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Jumlah aset Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023 adalah sebesar Rp2,55 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,03% dibanding 2022.

Kedua terdapat penurunan aset lancar dibanding 2022 disebabkan pada tahun 2023 proses hibah persediaan diserahkan ke masyarakat banyak yang sudah selesai.

Yang ketiga, terjadi kenaikan aset tetap namun tidak signifikan karena terdapat transfer masuk aset dari BRIN.

Yang keempat, terjadi penurunan aset lainnya karena adanya penghapusan aset rusak berat yang dihentikan dari penggunaan operasional. Yang kelima, kewajiban pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah kewajiban jangka pendek sebesar Rp37,78 miliar pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 104,44% dibanding tahun 2022. Terjadi juga kewajiban karena pengakuan akuntansi atas belanja bulan Desember 2023 yang dibayar pada tahun 2024 dan terdapat banyak belanja barang menggunakan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Jumlah ekuitas Kementerian Desa PDTT tahun 2023 sebesar Rp 2,51 triliun mengalami penurunan 1,81% dibanding tahun 2022.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Berikutnya laporan operasional tahun 2023 dibandingkan dengan 2022. Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan kegiatan operasional dan non operasional berbasis akrual. Pada kegiatan operasional tahun 2023 terdapat pendapatan negara bukan pajak lainnya sebesar Rp2,84 M, dan beban operasional sebesar Rp3,38 triliun yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang diserahkan kepada masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih.

Pada kegiatan non operasional terdapat pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp795 juta, beban pelepasan aset non lancar Rp61,3 M, serta kegiatan non operasional lainnya berupa pendapatan sebesar Rp18,52 miliar, dan beban sebesar Rp16 juta sehingga pada laporan operasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023 terjadi defisit sebesar Rp3,41 triliun.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Terkait dengan perubahan ekuitas dimana tahun 2023 ini menggambarkan perubahan ekuitas awal tahun hingga akhir tahun. Ekuitas merupakan kekayaan bersih dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas awal sebesar Rp2,56 triliun, defisit laporan operasional Rp3,41 triliun koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp15,15 M, transaksi antar entitas sebesar Rp3,39 triliun, sehingga menjadi ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp2,51 triliun. Terdapat penurunan ekuitas akhir tahun dari semula Rp2,56 triliun di tahun 2022 menjadi Rp2,51 triliun di 2023 dikarenakan meningkatnya defisit pada laporan operasional.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Ini terkait dengan laporan realisasi anggaran tahun 2023. Selanjutnya, yang terakhir kami juga ingin memberikan respon balik terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan rapat terkait dengan temuan BPK. Meskipun WTP memang masih ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti oleh kementerian, dan ini sudah kita tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Semuanya sudah kita tangani dan tuntas dalam proses sesuai dengan arahan dan rekomendasi BPK.

Kemudian yang terkait dengan pengawasan pemanfaatan dana desa ke depan, memang betul ini betul-betul membutuhkan pemikiran dan konsep yang serius. *Alhamdulillah*, sampai hari ini kita memang sudah merumuskan beberapa usulan kebijakan antara lain tentu ini terkait juga dengan perubahan regulasi, kemudian upaya pendampingan yang lebih masif kepada kepala desa, kemudian pengawasan lebih intensif dan pengawasan terpadu. Ini konsep-konsep yang sudah kita rumuskan untuk kita rekomendasikan di pemerintahan berikutnya, *Insy Allah* nanti akan segera kita kirim juga kepada Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Kemudian terkait dengan pengembangan desa wisata dan BUMDes, kita terus berikhtiar agar desa wisata menjadi bagian penting dari upaya peningkatan pendapatan desa, peningkatan kesejahteraan warga, juga peningkatan ekonomi warga. Hampir semua desa wisata, *alhamdulillah*, hari ini selalu melibatkan partisipasi warga setempat. Ini juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan ekonomi warga.

Kemudian terkait dengan BUMDes, kita terus melakukan ikhtiar-ikhtiar lintas kementerian dan lembaga agar ada perlakuan-perlakuan khusus termasuk di antaranya adalah terkait dengan pajak. Meskipun pada kenyataannya BUMDes ini dari lahirnya regulasi terkait dengan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan hari ini masih kita temukan beberapa kebijakan kementerian/lembaga yang belum memasukkan BUMDes sesuai dengan perintah undang-undang. *Alhamdulillah*, terus kita lakukan koordinasi, terakhir juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian ini juga terkait pada saat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita juga membahas agak intensif terkait dengan dana konservasi dan dana rehabilitasi. Kita sudah melakukan telaah dan juga melakukan langkah-langkah konkrit, misalnya terkait dengan kebutuhan untuk lahirnya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut atas pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nanti langkah-langkah itu akan juga kita kirimkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk dibantu mengkomunikasikan lintas kementerian sekaligus mendapatkan masukan-masukan agar apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat yang datang ke DPR RI khususnya ke Komisi V bisa terjawab semua permasalahannya.

Kemudian koordinasi dengan Kementerian Keuangan utamanya terkait dengan BUMDesa, dengan pajak, dengan kemudahan-kemudahan di dalam pengembangan usaha ini juga terus kita lakukan.

Demikian

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Yang bisa kami sampaikan mohon masukan, arahan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, terima kasih Pak Menteri.

Demikian paparan dari Pak Menteri.

Nampaknya ada Anggota baru kita ini. Ini kayak-nya stok lama yang didaur ulang ini. Ini didaur ulang, istilahnya ini didaur ulang nih, Pak. Kayak-nya beliau ini bolak-balik Komisi V ini sudah sebanyak periodenya, sudah empat kali kelihatannya.

F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):

Ternyata enak di V, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Silakan Pak Bakri, memperkenalkan diri.

F-PAN (H. A. BAKRI HM, S.E.):

Cukuplah.
Terima kasih banyak Pak Menteri.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik. Ini kita dapat surat teman-teman dari PAN, Pak Bakri kembali bergeser ke Komisi V. Selamat datang Pak Bakri, selamat bergabung kembali di Fraksi Komisi V DPR RI. Ini Pak Menteri, kita doakan jadi menteri lagi. Kalau kalau ndak jadi menteri, katanya mau jadi Pimpinan Komisi V. Iya, karena beliau ini terpilih sebagai Anggota DPR periode 2019, *eh* 2024-2029.

Baik. Langsung saja kita daripada berlama-lama ya, ini akan Menteri Desa, PDT, Transmigrasi ya kita kasih, saya sudah lihat muka Pak Ruslan Daud di sini. Mana Pak Ruslan tadi? tak bertanggung jawab *nih*, Pak Ruslan ini. Neng Eem tadi mana ya? pergi juga? tadi ada dia, tadi dia. Ada Pak Alim, Pak Aim? ya. Ada Pak Dedi ya. Baik, ini dari PKB ya. Baik Bapak-Ibu sekalian sudah bisa kita buat kesimpulan rapat hari ini.

Baik, Muhammad Aras saya persilakan.
Bersiap-siap Bu Sri Rahayu.

F-PPP (DR. H. MUH ARAS, S.PD., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Selamat Pak, semoga jadi menteri lagi bahasanya Pak Ketua ya.

Dan hadirin yang sama berbahagia.

Sebenarnya tadi tidak banyak yang ingin saya serahkan, saya hanya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri kerjasamanya selama kurang lebih 5 tahun ini. Kami mendapatkan banyak manfaat dengan bisa bermitra dengan Kementerian Desa, mendekatkan kami kepada teman-teman yang ada di desa yang tentu hal ini mengharapakan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Kenapa? karena desa ini adalah daerah yang paling besar masyarakat miskinnya, sehingga butuh uluran tangan, butuh perhatian khusus dari pemerintah untuk bagaimana membimbing mereka sehingga mereka bisa bangkit dan tentu mengikuti teman-teman kita yang ada di daerah-daerah yang maju.

Yang kedua, tentu program-program yang 2024 ini yang belum berjalan, mohon segera dijalankan terutama yang BUMDes, wisata apa desa wisata,

kemudian beberapa program yang ada di daerah-daerah yang sangat tertinggal tentu segera dijalankan sebelum berakhir program 2024. Itu aja.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Bu Sri Rahayu, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Saya hanya ingin menyampaikan apa, pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan penerimaan negara bukan pajak, Pak. Ada selain penjualan-penjualan aset ataupun apa tadi penjelasan, itu penerimaan bukan pajaknya apa? dari, iya, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, dari..., dari semua ini kan kita enggak tahu secara persis, Pak, rinciannya kita kan hanya global-nya aja untuk perkembangan saja, sehingga kalau kita mau mendalami juga agak susah ini yang tahun 2024 gitu. Dari yang Bapak sajikan tadi di tahun 2024 hingga bulan Agustus ini sampai 53%, ya Pak ya, 52 apa 53 tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah oke kalau kalau yang bagian sumber daya manusia mungkin sebagian besar untuk pendamping ya, Pak ya, sebagian besar.

Kemudian untuk yang berikutnya yang masih di bawah 50% terutama yang masih 37%, Pak, ini kan ada Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, kemudian Direktorat Jenderal, itu kira-kira pada akhir tahun ada persoalan enggak untuk menyelesaikan ini, karena ini kan judulnya pembangunan desa, pasti ada hal-hal fisik yang memang dilakukan untuk program ini termasuk Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Meskipun nilainya dari yang ada ini tidak terlalu besar tapi ya memang itulah anggaran yang memang harus kita monitoring terus supaya betul-betul memang yang sedikit ini mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama.

Kemudian yang ketiga, saya juga enggak..., enggak tahu secara persis, Pak, dari laporan neraca yang ada. Oke, kalau aset lancar memang itu bisa berubah-ubah ya sesuai dengan ini. Yang ingin saya tanyakan adalah di sini terjadinya kenaikan aset tetap, namun tidak signifikan, memang karena terdapat transfer masuk aset dari BRIN, ini aset apa yang dari BRIN ini? yang tahun 2023, mohon penjelasannya. Dan dari aset tetap yang ada, memang

cukup lumayan sih untuk tahun 2023 ini, dan itu juga ada..., ada penjelasan ya yang ada di pendapatan, kemudian jumlah beban operasional, dan selanjutnya di situ ada pada halaman 12.

Kemudian yang ketiga, Pak, eh yang terakhir, Pak, saya ingin sampaikan bahwa tadi Bapak menyampaikan desa wisata kemudian BUMDes. Yang ingin saya sampaikan adalah penjelasan seberapa jauh untuk desa-desa yang dibangun kemudian mengarah kepada desa mandiri. Saya punya pikiran begini, Pak, ke depan barangkali nanti bisa dimasukkan di dalam Anggaran tahun 2024 yang sekarang, eh 2025, yang sekarang sedang dibahas. Kita belum, saya terutama ya belum pernah tahu secara persis mulai dari titik mana desa ini dibangun, kemudian sampai sejauhmana, berapa kali tahapan program yang diperuntukkan untuk desa tersebut. Kenapa saya menyampaikan hal ini? karena untuk mengevaluasi itu akan lebih mudah, sehingga tidak hanya sekedar motong dari tengah-tengah kemudian diberi program setelah itu dianggap desa maju atau berkembang, berkembang atau maju.

Harapan saya dari desa yang sangat-sangat tertinggal semakan..., semacam *pilot project* begitu, Pak, ini desa yang sangat-sangat tertinggal, kemudian dibuat semacam *field study*-nya atau ndak tahu apa namanya, perencanaannya, sehingga yang mulai dari desa sangat-sangat tertinggal ini menjadi desa berkembang, ini kira-kira akan dibangun berapa lama, membutuhkan anggaran berapa? berapa lama bisa diselesaikan, sehingga menjadi desa maju ataupun menjadi desa mandiri dan seterusnya? Kenapa ini saya sampaikan? kalau kita demikian, maka untuk mengurangi desa tertinggal itu akan semakin jelas dan hasilnya juga akan semakin nyata, bahwa program-program di Kemendes yang sedikit ini bisa dilihat kemajuan dan perkembangannya untuk kepentingan warga masyarakat yang memang berada di 3T terutama. Mungkin juga tidak 3T banyak kabupaten/kota yang masih memerlukan itu juga, gitu, meskipun yang sangat dibutuhkan di sana. Kenapa? sekali lagi saya sampaikan supaya kita bisa evaluasi, *monitoring*nya lebih gampang. Jadi tidak memenggal dari tengah kemudian dijadikan, tetapi mulai dari nol, kemudian dibuat sampai dengan desa maju ataupun mungkin desa mandiri atau lebih, mana yang paling paling top dari desa yang kira-kira ada dalam perencanaan dari Kementerian Desa.

Saya ingin itu karena apa?, karena berharap ke depan program Kemendes ini fokus tidak hanya sebagai program yang meratakan program tetapi fokus pada fungsinya, tujuannya dari adanya Kementerian Desa. Kan semuanya arahnya kepada desa untuk berkembang, untuk maju kan semua program-program ini. Tapi sekali lagi dengan adanya mungkin kalau desa yang sekarang dibuat 10 desa, tetapi kalau untuk ini hanya beberapa desa misalnya, ndak apa-apa menurut saya. Tetapi ke depannya sudah, sudah bisa untuk dilihat, sudah bisa untuk dirasakan hasilnya, bahwa desa ini betul-betul dibina, betul-betul dibangun, sehingga menjadi desa yang diharapkan oleh kita semua.

Nah, untuk itu saya mohon dengan hormat mulai tahun 2025 barangkali bisa di, kalau Pak Menteri masih punya kesempatan untuk merencanakan itu

dan barangkali tadi menginginkan atau di sini menjadi menteri lagi, doanya, Pak, tapi kayak-nya Pak Menteri kepingin di sini seperti Pak Ketua tadi, katanya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan.

Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti.
Matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik.

Terima kasih, Bu Sri Rahayu.

Selanjutnya ke Pak Aim Falachudin, lagi keluar.
Pak Sudewo, sekalian menutup rangkaian acara hari ini.
Silakan.

F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan kawan-kawan yang saya hormati,
Pak Menteri yang saya muliakan, saya bangga dengan seluruh jajarannya,

Banyak doa, Pak, kepada Pak Menteri untuk menjadi menteri lagi, Pak, tapi saya sangat tidak berharap kalau Pak Menteri ini menjadi Menteri Desa lagi, karena sangat minimnya program. Tidak ada yang bisa kita minta, tidak ada yang bisa kita harapkan, kalau Bapak menjadi Menteri Desa lagi.

Itu Pak Bakri kembali ke Komisi V lagi itu karena penasaran ya. Banyak informasi yang diterima oleh Pak Bakri, bahwa di Menteri Desa ini bagus sekali. Banyak program desa wisata, dan desa, dan pasar desa yang akan diberikan kepada Anggota Komisi V. Setiap Anggota katanya paling enggak 10 titik, *gitu kan*. Makanya dia semangat sekali kembali ke Komisi V, tetapi sampai di sini, dia baru tahu, *gitu*, baru tahu, bahwa tidak ada perubahan seperti yang dulu, bahkan minus. Tapi minusnya ini ya juga bisa kami sadari, Pak, karena Menteri Desa ini anggarannya ya segitu-segitu terus, bahkan ada apa itu namanya, *adjustment*. Anggaran dari Kementerian Keuangan malah menurun, ya kami menyadari juga hal itu toh hanya satu dua titik pasar desa dan desa wisata itu juga tidak berpengaruh terhadap elektoral kami Anggota Dewan di Dapil, Pak, itu.

Itu maksimal yang bisa dilakukan oleh Pak Menteri, maka kalau kawan-kawan berharap Pak Menteri ini Pak Gus Halim menjadi Menteri lagi jangan di Menteri Desa, Pak itu, menjadi Menteri PUPR *gitu lah, gitu*, misalnya. Anggarannya yang jelas, banyak programnya gitu.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pak, yang ngomong ini orang Pak Prabowo, loh Pak. *Nah*.

F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya yang ikut, saya ikut rundingan menyusun kabinet, Pak.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Malah Komisi V usulnya Mas Dewo menterinya, kalau bisa.

F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Semua biar mendengar kalau mau lobi, lobi ke saya saja ya nanti, Pak Sugito yang jadi Menteri Desa, Pak Menteri Desa jadi Menteri PUPR. Pokoknya tergantung pendekatan kepada saya aja, Pak. Itu *guyonan*, kalau didengar sama Pimpinan, malah saya kena marah nanti.

Jadi saya memang harus hadir pada rapat kali ini dan nanti kalau Pak Menteri Desa rapat lagi di Komisi V, saya usahakan datang lagi, karena ini sesi yang terakhir, sesi yang terakhir dengan Pak Menteri Desa, *gitu loh*. Jadi kita harus melepas Pak Menteri Desa ini dengan baik-baik, dengan satu kesan yang, yang baik begitu, karena memang kinerjanya Pak Menteri Desa ya baik. Baik itu terlihat dari apa, di WTP itu tadi. WTP itu kan satu penilaian yang..., yang betul-betul resmi, formal, yang di, yang menilai adalah lembaga yang memang mendapatkan amanat dari undang-undang. Lima kali berturut-turut di bawah kepimpinannya beliau, tapi saya enggak tahu itu nanti kalau Menteri Desanya ganti bisa berturut-turut seperti ini atau tidak.

Meskipun ini sesi terakhir, tapi memiliki waktu yang sangat strategis, karena penyusunan anggaran, penyusunan program 2025 itu ya ditentukan pada bulan-bulan ini. Kalau enggak salah pada tanggal 3 Oktober 2024 itu sudah ketok anggaran untuk 2025, artinya kan dari bulan-bulan ini sampai dengan 3 Oktober itu adalah masa-masa yang sangat penting, waktu yang sangat penting untuk menentukan arah dan kebijakan 2025 dan itu masih di tangan Pak Menteri ya. Saya harapkan pelaksanaan 2024 ini, penyusunan anggaran 2024 ini sebagai refleksi, Pak, sebagai refleksi Kementerian Desa untuk menyusun program, kebijakan di 2025 yang lebih bagus. Sebagaimana yang disarankan oleh Bu Sri Rahayu oleh Pimpinan, itu bisa betul-betul mendapatkan perhatian, dan terpikirkan, terimplementasi dalam program.

Kita ini kan sebenarnya prihatin dengan anggaran Kementerian Desa yang hanya 3 triliun, 3 triliun itu maksimal ini sebenarnya nya prihatin. 80.000 desa sekitar itu di seluruh Indonesia, tapi anggaran hanya maksimal 3 triliun. Harapannya, ekspektasinya sangat besar bagaimana ada satu perubahan baik itu kualitas, maupun dari kuantitas ya tapi dengan anggaran segitu memang sangat sulit untuk dilakukan. Namun demikian, upaya kita untuk menambah anggaran agar ada perubahan mindset, perubahan pola pikir dari Kementerian Keuangan ya memberikan alokasi anggaran kepada Kementerian Desa itu bertambah menjadi lebih besar sampai sekarang upaya itu sia-sia, tidak membuahkan hasil, artinya apa ya udah nasib atau takdir dengan anggaran segitu, kita terima.

Kemudian apa yang harus kita lakukan, ya internalnya Kementerian Desa ini melakukan satu penyesuaian supaya anggaran yang segitu, tapi memberikan produktivitas yang tinggi untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat di pedesaan. Saran saya, saran saya, saran saya adalah anggaran ini arahkan, Pak, kepada satu kebijakan ya supaya tercipta sumber daya manusia yang unggul ya baik itu keterampilannya ya, kemudian kemampuan untuk melakukan satu produktivitas jasa, marketing, dan segala macam pada bidang-bidang tertentu, pada bidang-bidang tertentu. Jadi tidak bisa merubah secara fisik ya karena anggarannya segini.

Nah, seperti halnya Kementerian PUPR merubah cara fisik membangun satu jalan terjadilah satu perubahan infrastruktur jalan itu, merubah sarana prasarana sumber daya air sehingga terbangunlah bendung, terbangunlah waduk, jaringan irigasi, dan segala macam. Tetapi yang terjadi perubahan di Kementerian Desa adalah banyaknya orang yang punya kemampuan, yang punya keterampilan untuk menjalankan satu bidang atau kegiatan perekonomian tertentu. Semakin banyak orang yang punya kemampuan untuk menjalankan kegiatan perekonomian tertentu itulah merupakan modal utama terjadinya satu pergerakan perekonomian baik itu di sisi produksi, baik itu di sisi marketing ya. Itu Kementerian Desa semakin banyak menciptakan orang itu. Apakah itu di bidang UMKM, pasar, BUMDes, dan segala macam, banyak bidang yang ada di situ. Tercipta kemandirian-kemandirian perekonomian pedesaan itu adalah hasil hasil karya, hasil kebijakan Kementerian Desa. Jadi semakin banyak dilakukan kegiatan-kegiatan, melakukan koordinasi dengan lintas instansi, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah ya. Mendorong apa yang harus dilakukan disitu lah Kementerian Desa hadir. Daripada anggaran yang sedikit, tapi diwujudkan dalam bentuk fisik, itu pun tidak tidak memberikan arti, tidak memberikan nilai tambah.

Nah, ini saya memberikan masukan maka pentingnya sesi ini menyusun program karena masih di tangannya Pak Menteri, Pak Menteri Desa. Saya mendorong dari sisi itu, Pak, misalnya kayak pasar desa ini kan kegiatan perekonomian yang sudah *settle*, *real*, di situ ada kegiatan. Kalau memang itu untuk fisik, ya fisik yang sudah ber sudah berjalan perekonomian itu tidak merupakan tidak uji coba, tidak eksperimen, tidak spekulasi gitu. Misalnya desa wisata, desa wisata itu di sini hanya objek, tapi belum menjadi destinasi wisata karena minimnya akses. Lah, akses itulah yang perlu dibantu misalnya oleh

Kementerian Desa. Jadi dengan adanya pembangunan jalan membuat akses kepada objek wisata ini *real*, ada satu perubahan. Ya, selain dari menciptakan manusia-manusia yang terampil, manusia-manusia yang tangguh untuk menjalankan satu perekonomian.

Nah, maka penting sekali Pak Menteri Desa untuk melaksanakan, ada seni lah, ada seni, ada ilmu dari penyusunan program terhadap anggaran yang sangat terbatas itu. Sudah baik tapi paling tidak, bisa menyerap bisa mengakomodir masukan-masukan ini akan jauh lebih bagus. Jadi saya kira itu, Pak Menteri, mudah-mudahan Bapak kalau tidak jadi Menteri Desa, kalau hanya Menteri Desa, mending enggak usah jadi menteri, Pak. Saran saya enggak usah jadi Menteri, jadi Ketua Komisi V malah lebih ini, kayak Pak Lasarus, begitu, atau jadi Wakil Ketua DPR RI begitu, malah *gitu*. Saran saya jangan jadi Menteri Desa, Pak, *gitu loh*, menjadi Menteri PUPR atau apa, begitu.

Itulah yang saya harapkan, Bapak jangan jadi Menteri Desa, tidak bisa yang saya minta, tidak ada yang bisa saya minta, itu, jangan jadi Menteri Desa, *gitu*. Tapi bukan berarti Menteri Desa ini nganu ya bukan berarti apa, saya, saya jadi satu perbandingan seolah-olah ini tidak, ini kecil begitu, tidak, ini guyonan saja, guyonan saja. Menteri Desa juga punya nilai yang sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan negara. Harapan saya nanti ke depan Menteri Desa pada kabinet yang baru akan bisa meningkatkan apa yang diraih oleh Pak Menteri Desa sekarang ini. Saya kira itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Terima kasih, Mas Dewo.

Terakhir Pak Syahrul Aidi. Oh iya, Pak Aim udah dateng ya?
Ya Pak Syahrul dulu deh. Silakan.

F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, LC., M.A.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Pak Menteri Desa beserta jajaran,

Kadang-kadang kita banyak berharap dengan Kementerian Desa cuman kalau dilihat dari segi anggaran sangat-sangat terbatas, Pak ya. Ini saya ngusulkan saja, Pak, inikan memang Menteri Desa ya, bisa saja bertukar, bisa

saja tetap, tetapi kan yang namanya Dirjen, segala stafnya masih sana. Saya mengusulkan harus merombak ya, struktur Kementerian Desa dan nomenklturnya. Ini Pak Dewo *nih* orang, orang Gerindra, barangkali bisa mengusulkan. Kita banyak ya, bahkan isu desa ini menjadi isunya Pak Presiden kemarin. Membangun dari desa, dan kepala daerah selalu berbicara tentang desa, dan permasalahan tadi dikatakan kemiskinan kita di desa, keterbelakangan kita di desa, kebodohan kita di desa ya, aksesibilitas kita yang terhambat yang belum tercapai adalah di desa.

Nah, saya melihat begini Bapak-Ibu yang selalu kita, nomenklatur ini adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saya mengusulkan agar Pembangunan Daerah Tertinggalnya ini dikeluarkan dari Kementerian Desa, Pak. Terlalu berat lah Kementerian Desa harus dibebankan untuk membangun daerah tertinggal. Yang namanya judul itu adalah substansi, Pak. Judul atau tema atau nomenklatur dari sebuah kementerian itu adalah *core*-nya. Jadi apakah *core* Kementerian Desa itu pembangunan daerah tertinggal? hilang kan? Berbeda jadinya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kalau disatukan hanya dua nomenklatur, setuju, Pak, misalnya Kementerian Desa dan Transmigrasi, *it's okay*, karena memang orang bertransmigrasi itu ke desa ya. Ya, nanti akan menjadi kelompok masyarakat yang pada akhirnya menjadi desa, kan begitu.

Tetapi kalau dibuat nama nomenklturnya Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, ini rancu, Pak. Kalau kita lihat lagi di anggarannya kan pernah kita bahas itu. Apa kegiatan Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal? Iya, saya lihat, ya Allah, ini bukan skalanya pembangunan daerah, yang kita pahami kan daerah itu kan ternyata kabupaten Pak, ya kan. Lalu kita berkilah bahwasannya Kabupaten tanggung jawabnya, iya makanya keluarkan dari Kementerian Desa. Cukup dua saja, Kementerian Desa dan Transmigrasi. *Nah*, desa itu bisa nanti pembangunannya.

Nah, kalau saya boleh mengusulkan ini, ini sebetulnya Kementerian PU terlalu gemuk, Pak. Kementerian PU itu mengatur urusan triliunan, ratusan triliun, dengan sampai urusan 200 juta, Pak. 200 juta itu diurus oleh Kementerian PU, harusnya itu diurus oleh Kementerian Desa, begitu. *Nah*, saya berpikirkannya, begitu Kementerian Desa yang memang basisnya adalah basis pemberdayaan masyarakat, IBM, Infrastruktur Berbasis Masyarakat melibatkan peran apa namanya, masyarakat di desa, itu diurus oleh Kementerian Desa. Jadi betul-betul fokus, fokus Kementerian Desa itu adalah membangun desanya.

Ini sekarang enggak, ya. Orang mengira membangun desa itu konotasinya yang membangun itu tanggung jawabnya adalah Kementerian Desa, tetapi ternyata itu terlalu banyak yang masuk kan sampai Kementerian PU. *Nih*, kawan setuju atau tidak *nih*, karena kita *nih* kan akan ada periode baru ya, ini harus siap-siap juga kalau nanti memang berubah, ya. Kalau di beberapa Dirjen kegiatan beberapa Dirjen itu sudah oper saja ke Kementerian Desa, sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Desa itu

bahwa sekian tahun yang akan datang, sekian tahun yang akan datang, 2 tahun atau 3 tahun, atau 5 tahun, tidak ada lagi desa sangat tertinggal, tidak ada lagi desa tertinggal, yang ada hanya desa berkembang, desa maju, dan mandiri, jelas Pak, sehingga bisa di-*profile* oleh Kementerian Desa, ini desa sangat tertinggal, permasalahannya infrastruktur, ya selesaikan infrastruktur dalam skala di desanya. Kalau skalanya sudah menyangkut ke kabupaten, baru itu serahkan ke kementerian, serahkan itu ke ke kabupaten atau ke daerah.

Jadi, ini usul saya, Pak. Saya melihat, saya berharap banyak sebetulnya dari Kementerian Desa ini, dan begitu konotasi orang dan saya apresiasi ini. Sekarang ini apa namanya, Pak Menteri walaupun ini pernah kita diskusikan ketika Covid-19 kemarin terjadi, itukan Kementerian Sosial data DTKS-nya itu tidak bisa menampung seluruh masyarakat yang memang miskin, Pak. *Nah*, melalui Kementerian Desa dengan kebijakannya dana DD itu bisa digunakan untuk penanggulangan Covid, bisa digunakan untuk BLT Dana Desa. *Nah*, mudah-mudahan ini dipola lagi, Pak, dipola lagi. Pola, pola maksud saya itu betul-betul apa namanya bisa berkolaborasi dengan data-data yang lain.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Ini barangkali masukan saya, karena ini akan ada periode baru, akan ada pemerintahan yang baru barangkali ya Bapak-Bapak dari Dirjen memberikan catatan-catatan lah, apa kira-kira masukan. Mengambil dari yang ya *Al akhdzu bil qadimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*, gitu, *bil jadidil ashlah*, jadi mengambil hal-hal yang baik yang sebelumnya kemudian mengambil untuk yang lebih baik yang akan datang. Barangkali ini penting kita lakukan Bapak-Ibu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Wah itu itu filosofinya bagus, Pak. Saya walaupun tidak ngerti, karena diterjemahkan oleh beliau tadi, filosofinya bagus, ya. Terima kasih juga untuk batiknya hari ini, Pak. Warna putih dipadu dengan merah hitam. Kelihatannya akan gabung di DKI kita, Pak. Ini kode ini, Pak, kode. Mana tahu lah, kan kita mana enggak tahu kan. Iya, politik. Di tempat saya, kita banyak bersama PKS, Pak.

Baik, Pak Aim Falachudin saya persilakan yang terakhir.
Di daftar yang terakhir, Pak.

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDIN MAHRUS):

Iya.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Begitu juga Bapak Menteri beserta jajarannya.

Pertama, yang ingin kami sampaikan, kami ingin mendapatkan penjelasan, Pak. Kenapa bantuan kepada desa atau masyarakat, dan seterusnya, BUMDes dan seterusnya, ini masih dalam tahap penyelesaian administrasi, sosialisasi, dan pengecekan lapangan, padahal ini sudah bulan Agustus, sehingga ada keterlambatan untuk realisasinya.

Yang kedua, kami ingin juga memberikan masukan agar bagaimana dana desa ini betul-betul efektif untuk desa bisa berkembang. Sebab kita tahu banyak sekali angkatan muda, sarjana-sarjana, itu banyak meninggalkan desa karena di desa tidak efektif untuk mencari rezeki. *Nah*, bagaimana potensi-potensi desa tersebut bisa dikembangkan dan menarik untuk mengurangi urbanisasi.

Kemudian yang ketiga, bagaimana ada pemanfaatan BUMDes ini betul-betul bisa menciptakan petani atau produk rumah tangga, di samping mereka bisa memproduksi tapi juga bisa berdagang atau menjual, Pak.

Itu saja yang kami sampaikan dan terima kasih atas waktunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, terima kasih.

Pak Tamanuri, silakan senior.
Silakan Pak.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Pimpinan serta seluruh Anggota,
Pak Menteri serta seluruh jajarannya yang saya muliakan, saya banggakan.

Sebenarnya begini, Pak, menteri-menteri yang lain itu sebelum mereka jadi menteri harus jadi Menteri Desa dulu. Kenapa demikian? orang dana yang Rp3,9..., Rp2,9 triliun harus men-*tackle* semua permasalahan apa itu, 80.000 desa. *Nah*, kalau dia sudah masuk, bisa lulus di Menteri Desa barusan kita orbitkan jadi Menteri PU, bisa kita orbitkan jadi menteri-menteri yang lain. Lulus, iya lulus dia. Jadi enggak usah lama-lama di Menteri Desa, satu tahun langsung dimutasikan.

Bapak Menteri, Bapak nanti tentu perlu membuat buku putih. Saya harapkan adalah, saya, saya harapkan adalah perlu penertiban atau penyelesaian desa-desa. Kalau di Lampung itu ratusan desa, Pak, yang desa-desa duduk di hutan kawasan. Bantuan sudah, segala sudah, segala sudah, tapi statusnya masih dalam hutan kawasan. Mereka tidak bisa jual beli, jual beli rumah aja hanya kwitansi aja, enggak bisa akta, enggak ajukan lagi sertifikat. Sedangkan mereka itu sudah mendapat bantuan dari Bapak, termasuk Bapak sudah memberikan bantuan kepada mereka.

Secara fisik mereka tuh tidak bisa kita bangun, tapi yang uang yang bantuan dana desa itu, itulah yang mereka bangun. Jadi oleh karena itu, ini sudah puluhan tahun, kalau berlarut-larut seperti ini, mau jadi apa mereka, kasihan. Seperti desa di Lampung Timur itu, itu rumahnya sudah ada yang dua tingkat, ada yang tiga tingkat, tapi mereka kalau jual beli itu hanya kwitansi, enggak bisa lebih dari situ. *Nah*, oleh karena ini, ini sebenarnya sudah di luar kewenangan Bapak juga harus kerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk merubah undang-undang, tapi perlu ada catatan, Pak. Jadi nanti kalau Bapak tinggalkan, pengganti Bapak sudah ada pikiran seperti itu.

Kemudian saya berterima kasih, walaupun saya tidak dapat baik apa desa wisata, hanya BUMDes saja, tapi saya sudah berterima kasih dan saya tidak mau terlalu *nyelekit ngomong*-nya karena saya tahu persis Bapak punya pokok 29, mau diapain uang itu, Pak, sedangkan programnya luar biasa. Sebenarnya kami sedih, Pak, kalau ngadapin Bapak *nih*, kan waktu kita rapat yang lalu itu nggak ada pertanyaan sama sekali, bubar, selesai karena itu, Pak. *Nah*, jadi sekarang ini buatlah catatan-catatan yang kami sampaikan ini supaya menjadi bahan pertimbangan Pak Menteri yang baru sebelum dia jalankan tugas.

Kemudian perlu saya ketahui juga, bahwa mungkin secara nomenklatur ya di Kementerian Bapak ini enggak usah lah ada Dirjen, Pak. Jadi langsung Kepala Biro aja. Jadi Eselon I enggak ada, hanya sekretaris saja. Sekretaris sudah itu di bawahnya sudah langsung direktur, direktur, direktur atau kepala biro, kepala biro, kepala biro. Terlalu besar, Pak, beban Bapak itu, terlalu besar, karena satu Dirjen itu harus punya anggaran. Loh gimana? *Nah*, kecuali kalau pemerintahan punya satu kebijakan, dari Dirjen PMD itu *ngegabung*, Pak. Untuk apa dua? Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri ada Menteri Desa. Jadi apa yang gunanya seperti itu, lebih baik, cuman ini bukan, bukannya kewenangan Bapak juga, terpaksa ini harus kita bersama-sama, bersama dengan, menteri.

Jadi Dirjen PMD itu dihapus, dimasukkan dalam Kementerian Desa. Jadi banyak manfaatnya. Daripada ada yang Kalibata, ya Bapak juga di Kalibata semua nih ya? Kalibata semua? oh, Pasar Minggu? iya. Jadi oleh karena itu semua yang disampaikan oleh kawan-kawan ini perlu dicatat, Pak, sebagai bahan menteri yang baru dalam melaksanakan tugas yang akan. Harapan kita adalah ke depan akan lebih baik lagi dan juga harapan kita anggaran ini ya dilipatkan lah jangan seperti ini. Kasihan, kasihan kita.

Saya rasa demikian, Pak, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PG (DR. H. ALI MUFHTI, S.AG., M.SI.):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, nambah.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Oh iya, silakan Pak.
Pak Ali Mufthi silakan.

F-PG (DR. H. ALI MUFHTI, S.AG., M.SI.):

Makasih, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi V,
Pak Menteri beserta jajarannya,
Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi V.

Terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan bicara tentang struktur atau bicara tentang apa yang dilakukan oleh kementerian ini, tapi mudah-mudahan diskusi, saya anggap ini diskusi, karena Pak Menteri sudah akan berakhir dan jadi Anggota Dewan. Tetapi satu hal yang menjadi hal strategis itu adalah tentang desa. Desa itu adalah potret yang sebenarnya Indonesia, karena Indonesia ini adalah sebuah negara yang terdiri dari desa-desa yang antik, asyik, dan tentu di situ banyak rona-rona kehidupan yang itu perlu kita berdayakan, itu butuh kita kuatkan.

Dan nomenklatur tentang pemberdayaan masyarakat di kementerian ini sebenarnya adalah bagaimana desa memasuki Indonesia 79 tahun merdeka ini juga ikut merdeka baik merdeka dari sisi kesehatannya, merdeka dari sisi pendidikannya, merdeka dari sisi ekonominya, dan merdeka pada aspek-aspek yang lain. Dan oleh karena itu, sebenarnya Kementerian Desa ini bisa meng-cover, memotret, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan selama lima tahun pemerintahan di bawah kementerian ini tentang apa itu desa, sudah ada berapakah desa. Kalau di dalam administrasi memang ada kelas desa mandiri, kelas desa ini, kelas desa ini. Tetapi sebenarnya mandiri ini struktur kekuasaan pemerintahan desa atau mandiri ini adalah ekonomi masyarakat desa. Ini yang harus dilakukan verifikasi dan penjelasan lebih lanjut karena yang kita pahami mandiri itu dalam dipahami sebagai sebuah kemandirian dari sisi fiskal, uang, dari sisi ini jadi struktur kekuasaan binaan desa.

Padahal sebenarnya yang paling penting, kemandirian desa itu bagaimana partisipasi masyarakat desa, ya. Masyarakat desa itu bisa partisipasi, masyarakat desa ada progres, masyarakat desa ada kemajuan ekonominya, masyarakat desa pertaniannya berjalan, masyarakat desa unit-unit usaha itu berjalan. *Nah*, itulah disebut dengan desa mandiri. *Nah*, kalau itu yang sebenarnya terjadi maka pemerintah desa dan masyarakatnya bisa berjalan secara linier, *gitu*. Tetapi fakta yang terjadi,

Bapak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian,
Pimpinan,

Yang terjadi selama ini, kan fungsi kementerian itu, fungsi institusi itu adalah melakukan mematik agar desa itu maju. Kementerian, institusi itu lah sumber inspirasi bagi desa untuk berkembang. *Nah*, tetapi sampai sekarang programnya. *Nah*, ini yang perlu juga dengan potret 8.000 lebih atau desa itu terus dengan uang yang sedikit gitu ya. *Nah*, ini juga menjadi persoalan. *Nah*, oleh karena itu,

Pak Pimpinan dan Pak Menteri,
Bapak-Ibu sekalian,

Bagaimana agar kementerian atau desa ini ke depan betul-betul bisa berkembang. Saya bisa merasakan, Pak, bagaimana desa itu mengajukan izin untuk unit-unit usaha susah gitu ya dan ini dari sisi, misal di desa di Trenggalek yang dulu pernah saya sampaikan dalam forum ini. Dia punya kemasan air minum sudah di apa, sudah ada gelasnya, ada botolnya, kemasannya bagus, tapi izinnya lama, enggak keluar-keluar. *Nah*, ini keberadaan kementerian menjadi tidak efektif itu ya, itu di Kecamatan Dongko itu ada bagus sekali itu kemasannya itu, Pak. *Nah*, ini menjadi penting kalau kita mau melakukan pemberdayaan terus masyarakat desanya, unit-unit usahanya enggak dapat *support* yang maksimal dari kekuasaan dari struktur pemerintah menjadi tidak efektif juga.

Ya saya pikir itu sekalian. Jadi kita harapkan Kementerian ini ke depan lebih lebih punya penguatan terhadap kelembagaan desa dan masyarakat desa. Misal pasar desa itu, pasar desa ini hanya temporer, politis sekali. Oh, Bupati ini mau Pilkada gitu gawe pasar desa menarik, *maringono* bubar ya. *Nah*, ini fungsi ini Bapak menjadi penting, kementerian Bapak ini.

Terima kasih Pak Ketua, Bapak-Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, terima kasih Pak.

Masih ada yang lain? Cukup?
Pak Ridwan ada masukan?
Baik, terima kasih teman-teman sekalian.

Pak Menteri, demikian masukan pendapat dan saran dari teman-teman Komisi V DPR RI. Saya menambahkan sedikit saja, Pak Menteri, biar lah jadi bahan *review* kita ke depan.

Saya dulu pernah protes, Pak, di sini terkait dengan maraknya Alfamart, Indomaret masuk sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Bahan, survei kita pernah, kami, saya pernah dikasih tahu salah satu akademisi, Pak, bahwa satu Indomaret atau satu Alfamart itu bisa membunuh 10 sampai 13 ya warung-warung rakyat di sekitarnya. Bapak bayangkan coba, jadi pengangguran satu keluarga, kalau 10 keluarga, sekian orang terima dampaknya. Kemudian ini uangnya kesedot ke satu oligarki saja. Dulu saya pernah bicara di sini, bahkan saya sempat mendapat protes lewat saya punya orang yang di atas. Kenapa Pak Lasarus itu nyenggol-nyenggol kami, kurang lebih begitu lah barangkali, Pak Menteri ya.

Tapi saya rasa juga harusnya diatur, Pak, dalam konteks kemandirian desa. Desa ini, kalau Bapak enggak *protect*, habis Pak. Jadi maksud saya pembangunan desa itu tidak hanya kita bicara membangun desa, Pak, tapi memberi ruang gerak desa itu menurut saya jauh lebih penting, Pak, dari hanya sekedar kita membangun saja. Pak, kita kasih berapa banyak pun uang, Pak, kalau ruang geraknya sempit, dia enggak bisa apa-apa. Suruh bersaing dengan konglomerat, desa mana kuat, Pak. Jadi harus ada batasan menurut saya, Pak Menteri. Memang ini tidak mudah, Pak. Nanti Pak Menteri kalau lakukan ini pasti Pak Menteri sebentar didatangi, kan lagi musim, Pak, begitu kerja beginian. Maka juga yang berani ngomong begini *nih*, kita barang antik di republik ini Pak Menteri tapi demi rakyat, demi masyarakat saya saya tetap suarakan ini, Pak.

Saya melihat di tempat saya, saya enggak perlu ke tempat lain, Pak, di daerah saya sendiri. Kalau saya ke kampung-kampung, Pak, Pak kenapa lah itu masuk sampai ke sini? Mereka bilang, "Enggak bisakah cukup sampai kecamatan saja? enggak usah masuk sampai ke desa-desa". Ini masuk sampai ke pelosok desa, Pak. Di satu sisi kita mau menggalakkan BUMDes, *iya kan*. Misalnya suplai air yang tadi bilang air dalam kemasan kata Pak Ali Mufhti tadi misal contoh. BUMDes-nya, harusnya mereka dengan sumber air yang bagus di kampungnya, mereka beli mesin yang standar, bisa *nyuplai* air di sekitar. Mungkin biaya produksi mereka, mereka tidak mampu menekan serendah yang pemain besar misalnya, ya akhirnya kan juga potensi BUMDes ini juga tergerus.

Kemudian ada banyak keluarga kehilangan mata pencaharian. Kalau satu Alfamart, Indomaret ini bisa membunuh 10 sampai 30, eh sampai 13 toko kelontong masyarakat di sekitarnya, Bapak kalikan di seluruh Indonesia ini. Berapa banyak keluarga terdampak? Pernahkah kita menghitung itu di ruangan

ini? Dalam konteks ketahanan desa, *gitu loh*. Dalam konteks ketahanan desa. Desa ini enggak mungkin bertahan, Pak kalau kita tidak protect. Mana mungkin dia disuruh bersaing dengan, ya mohon maaf, bantuan dari kita untuk BUMDes saja paling Rp50 juta, Pak. Ini yang datang ini gajah, Pak, bukan gajah lagi, Pak, kalau ada istilah lebih besar dari gajah yang lebih besar itu lah dia barangnya.

Nah, jadi menurut saya ini harus ada batasan, Pak, sehingga desa dalam konteks kita membangun desa, kita mem-protect desa untuk mereka bisa jadi desa mandiri, desa yang punya ruang gerak, tidak dibenturkan dengan kekuatan yang besar yang bisa menutup ruang gerak mereka di desa, itu pemerintah yang membuat batasannya. Itulah bahasa saya, Pak, berarti negara hadir di sana. Kurang kaya apa lagi sih mereka, Pak, kok harus masuk sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke dusun-dusun. Cukup lah, *gitu loh*. Dari dulu saya menyuarakan ini Pak Menteri, tapi sampai hari ini, kementerian Bapak pun tidak ada langkah apa-apa, saya lihat, ya. Apakah Pak Menteri takut? saya tidak tahu. Tapi kalau Bapak kurang berani kita berdua bertapa sebentar, Pak, biar berani kita berbagi.

Jadi ini harus ada keberanian kita membela masyarakat kecil karena menurut saya, Pak Menteri ini domainnya salah satunya Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pernah kita menghitung berapa dampak buruk bagi ekonomi desa terhadap siklus usaha ini? *Nah*, harus berani kita menghitung, Pak. Kemudian andai kata itu tidak dibuat seperti itu, berapa besar ruang gerak yang bisa dibuka untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di satu sisi, kita teriak-teriak tambah dana desanya, tambah dana desanya, tapi di sisi lain, negara ini memberi ruang yang sempit kepada masyarakat desa. Jadi kebijakan kita ini ambigu, Pak, ini seolah-olah dikasih tapi digencet dengan beban yang lebih besar.

Jadi, saya kadang-kadang miris, Pak, karena biasanya saya kalau ke kampung-kampung itu, Pak, Pak Menteri, pakai motor, singgah di warung-warung. Dulu tokonya gede, Pak, sekarang tinggal sedikit, lagi enggak mampu, Pak, bersaing dengan mereka katanya. Dia nunjuk ke toko sebelah yang lampunya lebih terang, Pak. Ya sedih juga kita mendengarnya. Itu PR kita, Pak Menteri, mudah-mudahan bisa jadi bahan evaluasi karena ini juga di akhir masa jabatan Pak Menteri.

Saya terakhir, Pak Menteri, saya tempo hari ada mengusulkan pembangunan jalan dari desa kami menuju desa transmigrasi, Pak. Sudah saya usulkan tempo hari, Pak Cece ya, ini beliau ada di belakang. Mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti sebagai kenang-kenangan dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jadi desa saya itu, Pak, di tengah daratan Pulau Kalimantan sana, di sebelah kami ini ada perkampungan transmigrasi, Pak Menteri. *Nah*, jadi kalau orang Dayak itu ada namanya gawai adat, Pak. Jadi kalau gawai adat mereka lewat hutan situ lah, jalan kaki nembus sampai ke kampung kita, *gitu loh*, Pak. Lewat hutan, Pak, jalan kaki hampir 2 jam lewat hutan belantara.

Nah, ini kita mau buka aksesnya supaya silaturahmi menjadi baik, hubungan kekerabatan menjadi lebih mudah. Sekarang ini sudah saling berkeluarga, Pak. Ada yang anaknya dari transmigrasi dapat istri-suami di tempat kita, ada yang keluarga kita yang berkeluarga di sini, tapi jalan *ndak* ada, Pak Menteri. Asli, jalan dilewati motor pun tak bisa, memang tak punya jalan. Ini kita mau buka akses ini. Tadinya saya mau ajukan dengan Inpres Jalan Daerah, Pak Menteri, tapi karena ruasnya pendek, tidak efektif kata Pak, Pak Menteri PU. *Nah*, karena ini hanya jarak berapa kilometer, *gitu lah*, kita buka saja dulu. Ya, nanti peningkatannya mungkin bisa pemerintah daerah atau bisa juga dari kita. Ini dalam konteks mata anggaran juga nyambung, Pak, karena ini bersebelahan dengan lokasi transmigrasi. Mudah-mudahan Pak Cece ini bisa dituntaskan, Pak ya. Kemarin saya juga sudah minta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, untuk kemarin koordinasi dengan kementerian, Pak, dalam konteks pemenuhan asas-asas kepatutan dalam pemerintahan karena ini perlu campur tangan pemerintah daerah. Saya rasa itu saja.

Saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan mana ada yang perlu ditanggapi kalau tidak nanti kita langsung menuju kepada kesimpulan rapat.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):

Terima kasih, Bapak-Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi V atas saran dan masukannya.

Yang pertama, terkait dengan beberapa kegiatan yang belum, masih dalam proses verifikasi dan lain-lain karena memang menunggu buka blokir juga. Jadi banyak sekali program-program yang dikelola atau diserahkan ke aspirasi Bapak-Bapak itu yang masuk pada *automatic adjustment* dan kita sudah ajukan, ajukan pembukaannya. Mudah-mudahan di bulan Agustus-September ini bisa realisasi dan itu berarti Bapak-Ibu masih menjadi bagian dari program atau keberlanjutan program ini.

Kemudian terkait dengan penerimaan negara bukan pajak kalau di Kementerian Desa enggak banyak, selain penjualan aset yang sudah tidak bisa dipakai itu ada namanya Gedung Makarti yang memang cukup laris disewa oleh orang..., oleh masyarakat umum untuk resepsi pernikahan dan lain-lain. Kemudian tambahan aset dari BRIN, karena kita ada kantor ya, kantor yang pindahan dari Abdul Muis. Jadi kantor Kementerian Desa, PDPT yang lama, yang induknya dulu itu ada di Muis, terus diminta oleh MK untuk perluasan kegiatan MK. *Nah*, kita di ditukar dengan aset yang miliknya BRIN di Kalisari, sehingga Kementerian Desa PDPT sekarang selalu dekat dengan kali, Kalibata dan Kalisari.

Terkait dengan tahapan proses pembangunan desa dari sangat tertinggal ke desa mandiri, kalau dihitung dari perjalanan yang sudah kita lihat fakta di lapangnya sejak 2000 itu ada sekitar, dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun, kecuali hal yang sifatnya sangat spesifik, ada yang 2 tahun. Jadi

h

misalnya ada 322 desa sangat tertinggal dari 2015 kemudian menjadi desa mandiri 2023, ini prosesnya.

Kemudian ada 1.196 desa sangat tertinggal tahun 2015 menjadi desa maju tahun 2023. *Nah*, dari sini kita hitung, itu butuh waktu 3 sampai 4 tahun untuk menjadi desa sangat dari sangat tertinggal menjadi desa maju dan desa mandiri. Meskipun ada yang 2 tahun, tapi kasus ini, kasus karena memang sangat kepala desanya sangat luar biasa. Dan ini juga sudah ada *best practice*-nya karena di kaitannya dengan indeks desa membangun itu ada tiga hal, yang pertama dimensi ekonomi, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi lingkungan, sehingga BUMDes, termasuk desa wisata itu menjadi bagian dari salah satu sub variabel di dalam dimensi ekonomi.

Kemudian terkait dengan nomenklatur Kementerian Desa dalam beberapa diskusi dengan tim transisi kayak-nya memang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya Pak Syahrul Aidi, jadi Kementerian Desa dan Transmigrasi. Cuma perlu ada penguatan regulasi, yaitu kewenangan atau beban atau tanggung jawab di Kementerian Desa untuk selalu bersinergi dengan kementerian/lembaga lain supaya semua barang masuk ke desa itu terkoordinasi. Itu yang yang yang dalam konsepnya seperti itu ndak tahu nanti hasilnya gimana, tergantung Pak, Pak Sudewo.

Kemudian apresiasi-apresiasi, kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga Pak Ali Mufthi, Pak Tamanuri, dan Bapak-Ibu yang lain. Nanti beberapa respon yang sifatnya teknis akan kita sampaikan secara lebih detail dengan data-datanya, termasuk misalnya kemungkinan-kemungkinan terkait dengan perubahan nomenklatur di Kementerian Desa.

Kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Lasarus, Alfamart, Indomaret. Kita sudah terus melakukan itu, bukan sekedar berkeluh kesah, misalnya kita mencoba membatasi itu dengan memberikan pendampingan untuk tata ruang desa, kita bekerja sama dengan ITS. Maksudnya ketika desa punya tata ruang, harus ada lahan sawah sekian persen, lahan hijaunya sekian, perumahannya sekian. Ini bukan hanya urusan Alfamart dan Indomaret, tapi juga pengembang-pengembang yang kadang-kadang datang di satu desa tanpa sepengetahuan desa, tahu-tahu di situ diuruk, di situ dibangun perumahan, karena memang desa tidak punya kewenangan apapun terhadap wilayahnya. *Nah*, dalam dalam konteks nomen, nomen apa regulasi, tentu ini bukan hal yang mudah, makanya kita coba masuk pada sisi basis aspirasinya. Jadi desa-desa kita berikan pendampingan beberapa untuk piloting, yaitu membikin tata ruang desa yang didampingi oleh Perguruan Tinggi ITS dari Surabaya.

Kemudian yang terkait dengan aspirasi Bapak-Ibu sekalian, tentu menjadi kewajiban kami, menyangkut khususnya di teman-teman di direktorat untuk menindaklanjuti dan segera merealisasikan.

Saya pikir itu Pak Pimpinan dan Anggota Komisi V, hal-hal lain nanti akan kita sampaikan dalam bentuk tertulis.

Demikian, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Baik, terima kasih.

Pak Menteri, mungkin kalau untuk pembatasan itu sebenarnya, Pak, itu dari izin usaha itu sebetulnya bisa, *gitu loh*. Cuma itu tadi memang instrumen, kan mereka kan harus izin usaha baru boleh buka, Pak, kalau izin usaha enggak keluar, enggak bisa buka. *Nah*, tapi izin usahakan yang mengeluarkan pemerintah daerah.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):

Daerah.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Nah, itulah tadi juga persoalan ketika lemah posisi Kementerian Desa, PDT, dalam Transmigrasi dalam konteks sebuah kementerian Pak, yang jangkauannya sampai ke desa, dusun, tetapi instrumennya itu hanya ada di sini. Ini masalah dari sisi tata negara kalau menurut saya. Harusnya pengendalian Menteri Desa dan Transmigrasi dalam konteks sebuah kementerian, Pak, dia harusnya bisa menerobos sampai ke bawah dalam konteks kementerian, karena tata urutannya kan menteri itu di atas pemerintah daerah, Pak. Walaupun ada namanya, ada namanya apa namanya, yang sentral, ada yang desentralisasi. Ada yang diserahkan kepada pemerintah daerah urusannya, ada yang diserahkan kepada pemerintah pusat yang tidak boleh dipegang oleh pemerintah daerah. Ada ruang sebetulnya di situ, Pak Menteri.

Jadi kalau saya rasa ini semakin kita ambil keputusan semakin lama, saya rasa semakin tidak terbendung, Pak, dan pada waktunya akhirnya menjadi kebiasaan dan akan terjadi lah seperti itu. Di satu sisi, kita ini kan masih berdarah-darah mau meningkatkan lagi dana desa, minta tambah lagi dana desa, jabatan ditambah, dana minta ditambah tapi di sisi lain *protect* terhadap apa namanya kekuatan desa itu lemah dari negara. Itu maksud saya tadi, Pak Menteri.

Baik, terima kasih Pak Menteri penjelasannya.

Sekarang kita langsung saja ke kesimpulan rapat. Baik.

Draf Kesimpulan Rapat Komisi V DPR RI Dengan Menteri Desa, PDT, Dan Transmigrasi.

21 Agustus 2024.

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 19 Agustus 2024, sebagai berikut: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi realisasi keuangan 52,25% dan Realisasi fisiknya 53,58%.

2. Kementerian... Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Selanjutnya Komisi V DPR RI minta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.

3. Komisi V DPR RI, komisi komi, ketiga, Komisi V meminta, ini Komisi V harusnya nih komisi doang ini. Komisi, komisi berapa gitu kan. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk:

a. Ini poin tambahannya, meningkatkan pengawasan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa program-program pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan:

b. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain terkait dengan pemberian hak atas dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi sesuai amanat Pasal 54 ayat (1A) ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

c. Melakukan penyusunan indikator kinerja dalam rangka pengawasan pemanfaatan dana desa;

d. Menetapkan target yang lebih terukur dalam proses pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa mandiri;

e. Mengoptimalkan pemanfaatan BUMDes untuk ketahanan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Teman-teman sekalian, cukup atau ada tambahan?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Cukup.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Cukup ya. Baik
Pak Menteri cukup?

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):

Cukup.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Cukup.

Dengan disepakatinya kesimpulan rapat ini, maka selesai lah rapat kita hari ini.

Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan Pak Menteri untuk menyampaikan sambutan penutup.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (DR. (HC) DRS. A. HALIM ISKANDAR, M.PD.):

Terima kasih.

Yang pertama, *alhamdulillah*, rapat kerja hari ini berjalan dengan lancar dan rekomendasinya juga sangat bagus. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita bisa menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dan rekomendasi rapat kerja hari ini.

Yang kedua, kami juga terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang telah banyak sekali memberikan dukungan dalam bentuk kritik, saran, dan masukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga kita terus berupaya meningkatkan segala hal yang menjadi tugas-tugas kita semua.

Dan yang terakhir secara pribadi, saya mohon maaf apabila selama kita bersinergi, bermitra mungkin meskipun masih ada pertemuan lagi kayak-nya untuk penetapan APBN dan lain-lain, tapi paling tidak saya sangat terima kasih selama ini kita bisa bersinergi dengan baik dan saya tidak ingin dilepas tapi saya ingin diterima oleh teman-teman di DPR RI.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (LASARUS, S.SOS., M.SI./KETUA KOMISI V DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Kita kasih *applause* buat Pak Menteri.

(TEPUK TANGAN DARI PESERTA RAPAT)

Terima kasih, Pak Menteri, saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V mengucapkan terima kasih atas atensi di rapat kita pada hari ini ya. Semoga kesimpulan rapat ini dapat ditindaklanjuti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalam rencana kerja dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ke depan.

Saya mohon maaf atas nama Pimpinan seluruh anggota, manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan.

Saya akhiri,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Rapat saya nyatakan selesai dan ditutup.

Terima kasih.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.14 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 21 Agustus 2024
a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

h